

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi yang semakin canggih di zaman digital saat ini membuat informasi semakin mudah dicari dan berbagai kegiatan bisa diselesaikan lebih cepat serta lebih akurat. Alat seperti komputer atau laptop bisa digunakan oleh individu maupun perusahaan sebagai sarana untuk menyelesaikan berbagai tugas secara praktis, cepat, dan tepat. Terutama dalam meningkatkan kualitas informasi pada laporan keuangan, tujuannya adalah agar bisnis atau perusahaan dapat berkembang dan mencapai kesuksesan. Teknologi yang terus berkembang juga memberikan dampak besar terhadap perkembangan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), seperti dalam proses pengolahan data dan pembuatan laporan keuangan yang sebelumnya dilakukan secara manual kini berubah menjadi sistem berbasis komputer.

Menurut Krismiaji (2015), Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu sistem yang memproses data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengoperasikan bisnis. Sistem ini juga merupakan bagian dari pengawasan internal yang membantu mendeteksi serta mencegah dampak dari lingkungan sekitar terhadap sistem tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan, manajer mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah efisiensi dan keberhasilan dalam berjalannya sistem informasi akuntansi, seperti yang disebutkan dalam Katili et al. (2017) dalam struktur pengendalian internal perusahaan. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan kondisi perusahaan masing-masing, salah satunya adalah sistem akuntansi berdasarkan pengeluaran kas.

Secara umum, Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas adalah metode untuk mengatur formulir, catatan, dan laporan yang digunakan dalam mengelola pengeluaran perusahaan, baik melalui cek maupun uang tunai. Hal ini membantu memudahkan proses pembiayaan dan pengelolaan keuangan perusahaan. Menurut Romney dan Steinbart (2016), pengeluaran kas adalah serangkaian kegiatan operasional bisnis yang melibatkan alur informasi secara terus-menerus, terkait dengan pembelian dan pembayaran barang maupun jasa. Karena hal tersebut, pencatatan pengeluaran kas sangat penting untuk memantau penggunaan dana yang digunakan dalam berbagai kebutuhan perusahaan.

Akuntansi di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) bertugas untuk mencatat semua urusan terkait pada pendapatan, pengeluaran, aset, dan pengelolaan uang kas, sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan daerah yang lengkap dan tepat. Uang kas mencakup uang tunai serta uang yang disimpan di bank, dan digunakan untuk berbagai kegiatan sehari-hari pemerintah daerah. Uang kas merupakan alat pembayaran yang sangat fleksibel dan selalu siap digunakan kapan saja. Namun, uang kas juga memiliki risiko tinggi terhadap tindak penyelewengan yang dapat menyebabkan kerugian besar. Cara memantau penggunaan uang kas bisa berbeda di setiap instansi. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ukuran instansi, jumlah karyawan, sumber dana, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, instansi harus mampu mengelola sistem informasi akuntansi dan kontrol internal yang baik agar bisa mengawasi pengeluaran uang kas secara tepat dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Penggunaan sistem informasi di BKAD Sleman mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan regulasi pemerintah. Awalnya, BKAD Sleman menggunakan aplikasi yang dikenal dengan nama SIADINDA (Sistem Informasi Administrasi Daerah). Aplikasi ini digunakan sampai sekitar tahun 2019. SIADINDA membantu dalam proses pengelolaan administrasi pemerintahan, termasuk dalam pencatatan keuangan dan pelaporan, namun seiring berjalannya waktu, aplikasi ini dianggap sudah tidak lagi relevan dengan standar nasional yang terus berkembang. Mulai tahun 2020, penggunaan SIADINDA dihentikan dan digantikan dengan SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah). SIKD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya standarisasi dan integrasi data keuangan daerah di seluruh Indonesia. SIKD digunakan oleh BKAD Sleman untuk mengelola data keuangan daerah secara lebih terpusat dan akuntabel. Sistem ini berlaku sampai dengan tahun 2024. Namun, sejak tahun 2024, terjadi perubahan kembali dengan diberlakukannya sistem baru bernama SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). SIPD merupakan sistem yang lebih lengkap karena tidak hanya mencakup aspek keuangan, tapi juga perencanaan, penganggaran, pelaporan, bahkan evaluasi pembangunan daerah. SIPD dirancang untuk menyatukan seluruh data pemerintahan daerah agar selaras dengan kebijakan nasional dan memudahkan koordinasi antar daerah dan pusat. Secara garis besar, perubahan dari SIADINDA → SIKD → SIPD merupakan bentuk dari transformasi digital yang terus dilakukan

pemerintah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan administrasi daerah. Hal ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi secara nasional.

Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, dibuatlah prosedur pengelolaan kas yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Instansi yang bertugas mengelola keuangan daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah. BKAD memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan dan memelihara aset daerah secara baik agar anggaran dapat digunakan sesuai dengan program-program yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. BKAD Kabupaten Sleman adalah salah satu instansi daerah yang bertugas melakukan proses pencairan dana Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD), penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah, serta penyusunan laporan mengenai pelaksanaan anggaran. Dalam menjalankan tugas tersebut, BKAD Kabupaten Sleman mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 54. 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dibahas sebelumnya, peneliti ingin mengetahui secara langsung bagaimana sistem informasi akuntansi digunakan dalam mengelola pengeluaran kas di lembaga pemerintahan serta seberapa baik evaluasi terhadap sistem informasi pengeluaran kas tersebut dilakukan. Oleh karena itu, peneliti memutuskan untuk memilih judul **“EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGELUARAN KAS DAERAH di BKAD SLEMAN”**.

1.2 Cakupan Pembahasan

Berdasarkan latar belakang perumusan masalah dalam penulisan tugas akhir yang telah dijelaskan di atas, pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana prosedur penatausahaan belanja menggunakan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas yang berlaku di BKAD Kabupaten Sleman?
2. Apa faktor yang mendorong perubahan dari SIADINDA ke SIKD, dan dari SIKD ke SIPD?
3. Bagaimana dampak perubahan sistem informasi terhadap efektivitas kerja di

BKAD Kabupaten Sleman?

1.3 Tujuan Peneliti

Tujuan peneliti melakukan penelitian terhadap BKAD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami bagaimana cara sistem informasi akuntansi pengeluaran kas beroperasi di BKAD Kabupaten Sleman.
2. Untuk menganalisis proses transisi dari SIADINDA ke SIKD, dan kemudian ke SIPD.
3. Untuk mengidentifikasi dampak perubahan sistem informasi terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh oleh peneliti dari laporan tugas akhir ini bagi berbagai pihak terkait, seperti mahasiswa, Badan Keuangan dan Aset (BKAD) Kabupaten Sleman, serta Politeknik YKPN. Berikut penjelasan mengenai manfaat yang diperoleh:

1. Bagi Mahasiswa
 - a) Membantu menjalani rasa disiplin dan tanggung jawab saat melakukan pekerjaan.
 - b) Memberikan pengalaman nyata dalam berbagai bidang di dunia kerja.
 - c) Membandingkan teori yang diajarkan di kelas dengan cara penerapannya di dunia nyata.
 - d) Sebagai persiapan diri dalam menghadapi persaingan dan tantangan di dunia kerja.
 - e) Membantu menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar diploma tiga akuntansi.
2. Bagi BKAD Kabupaten Sleman
 - a) Membangun kerja sama antara Politeknik YKPN dengan BKAD Kabupaten Sleman, sehingga lembaga tersebut semakin dikenal dalam dunia pendidikan.
 - b) Menciptakan citra positif bahwa lembaga pemerintah memperhatikan dan peduli dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
 - c) Mendapatkan bantuan dalam menyelesaikan tugas khususnya pada

bidang keuangan di BKAD Kabupaten Sleman.

- d) Mendapatkan informasi dan solusi mengenai masalah dalam penelitian yang dilakukan, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi BKAD Kabupaten Sleman dalam mengambil kebijakan dan keputusan terkait pengelolaan sistem informasi akuntansi pengeluaran kas secara lebih efektif di masa depan.

3. Bagi POLITEKNIK YKPN

- a) Terbentuknya kerja sama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak terkait.
- b) Sebagai bahan pembelajaran dan penilaian dalam program pendidikan di POLITEKNIK YKPN, dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- c) Pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian agar bisa menjadi referensi atau bahan acuan bagi penelitian di masa depan.
- d) Memberikan hasil penelitian sebagai bentuk kontribusi yang bisa meningkatkan kemajuan di masa depan.